

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Norwegia adalah negara yang berlimpah hutan, danau, flora, dan satwa liar telah menghadapi masalah dalam beberapa tahun terakhir dari pertumbuhan populasi dan pengembangan konsekuensi dari daerah perkotaan, jalan, dan pembangkit listrik tenaga air. Lantai hutan dan perairan telah tercemar oleh industri Norwegia sendiri dan oleh polusi industri udara dari Eropa Tengah dan Kepulauan Inggris dalam bentuk hujan asam. Masalah hujan asam telah mempengaruhi pasokan air bangsa di atas lahan seluas hampir 7.000 sq mi. Emisi partikulat tahunan memiliki rata-rata 22 ton dan emisi hidrokarbon telah sekitar 270 ton. Pada tahun 1992, Norwegia merupakan salah satu 50 negara dengan emisi dunia terberat karbon dioksida dari sumber-sumber industri, yang mencapai 60,2 juta metrik ton, tingkat per kapita 14,03 metrik ton. Pada tahun 1996, total naik menjadi 67 juta metrik ton. Emisi kendaraan transportasi juga merupakan sumber signifikan dari polusi udara. Pada awal 1980-an, pemerintah telah memberlakukan peraturan yang ketat untuk mencegah tumpahan minyak dari sumur dan kapal tanker yang beroperasi di landas kontinen Norwegia.

Perangkat perlindungan pantai telah sejak dipasang, dan teknologi baru untuk mencegah kerusakan minyak telah dikembangkan. Industri, pertambangan, dan pertanian telah tercemar 16% dari Norwegia air

danau. Bangsa ini memiliki total 382 cu km dari sumber air terbarukan; 68% digunakan untuk kegiatan industri dan 3% digunakan untuk pertanian. Kota bangsa menghasilkan rata-rata 2,2 juta ton sampah per tahun. Undang-undang kontrol polusi beroperasi pada premis bahwa pencemar harus menerima tanggung jawab hukum dan ekonomi untuk setiap kerusakan yang disebabkan dan untuk mencegah terulangnya kejadian negara membuat pinjaman dan hibah untuk pembelian peralatan pengendalian polusi. Pemerintah kota mengawasi pembuangan limbah¹

Sejak pembentukannya pada tahun 1972, Kementerian Lingkungan Hidup telah membuat badan lingkungan Norwegia. Antara tahun 1962 dan 1985, 15 taman nasional, dengan luas lebih dari 5.000 km persegi (2.000 mil persegi), dan lebih dari 150 cagar alam yang ditetapkan. Pada tahun 2001, 6,5% dari total luas lahan Norwegia dilindungi. Empat spesies mamalia Norwegia dan tiga spesies burung yang terancam punah yang. Empat spesies tanaman juga terancam. Spesies terancam termasuk sturgeon Baltik, rawa siput, dan kerang mutiara air tawar.

Kesadaran lingkungan menjadi faktor dalam manajemen Norwegia pada akhir tahun 1960-an. Masalah lingkungan lokal karena pembangkit listrik tenaga air dianggap sebagai tantangan oleh negara harus menghadapi. Ada fokus pada membangun kawasan lindung, dan membersihkan kotoran

¹www.nationsencyclopedia.com › Europe › Norway, Environment. *Norwegian Environmental Conditions*.

dan eutrophy masalah lokal di Fjord, Oslo dan beberapa perairan pedalaman, termasuk Mjøsa, danau terbesar di Norwegia. Industri dan sumber titik polusi juga menjadi diatur lebih ketat di bawah Undang-Undang Pengendalian Polusi, terutama di daerah di mana ada implikasi kesehatan.

Pembatasan dalam sabuk 100 meter diberlakukan pada tahun 1965 di bawah Rencana dan Pembangunan pemerintah, yang melarang pembangunan terlalu dekat dengan sungai dan garis pantai. Tingkat pembangunan bendungan melambat di tahun 80-an, dan sungai yang dipilih dilindungi sebagai akibat dari beberapa rencana perlindungan².

Dari tengah tahun 1970-an kegiatan lepas pantai muncul sebagai tantangan lingkungan, dan negara Norwegia sangat terlibat dalam peraturan untuk melindungi sumber daya kelautan dan lingkungan di sepanjang pantai dari tumpahan minyak dan emisi dari zat berbahaya. Pada 1980-an, fokus berubah menjadi lintas batas dan global isu, seperti pengasaman dan isu-isu lain yang terkait dengan polusi udara jangka panjang, zat berbahaya, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lapisan ozon, serta pemanasan global. Pada 1990-an, menjadi lebih jelas bagaimana perekonomian Norwegia dipengaruhi lingkungan di seluruh dunia.

Tujuan dari kerjasama pembangunan lingkungan Norwegia adalah untuk berkontribusi untuk mencapai Tujuan Pembangunan

²<http://www.environment.no/Topics/Norway/>. *State of the Environment Norway*.

Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs), sehingga memungkinkan bagi orang-orang miskin untuk memperbaiki kondisi hidup mereka dan kesehatan, dan mengurangi kerentanan manusia. Unsur utama dari kerjasama ini akan mendukung pasangan upaya negara untuk mencapai MDGs semua memastikan kelestarian lingkungan, dan khususnya target mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program negara. Rencana aksi ini telah disusun sebagai tindak lanjut untuk Memerangi kertas putih berjudul kemiskinan bersama: Sebuah kebijakan yang saling berhubungan untuk pengembangan ke parlemen.

Dalam rekomendasi mengenai kertas putih, Storting (parlemen Norwegia) meminta pemerintah untuk mengembangkan rencana aksi untuk keseluruhan kerjasama pembangunan lingkungan Norwegia. Dalam program kebijakan, yang pemerintah saat ini diperkuat baris ini dengan menyatakan niatnya untuk Norwegia untuk memainkan peran utama dalam mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke dalam kerjasama pembangunan.

Bersama-sama dengan tujuan politik ini, perjanjian lingkungan multilateral, Agenda 21 dan Deklarasi Johannesburg memberikan dasar untuk upaya Norwegia untuk mengatasi tantangan global yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam sebagai bagian dari upaya internasional umum. Prioritas Norwegia membangun kesadaran dari hubungan dekat antara lingkungan dan kondisi kehidupan masyarakat miskin. Jika kita ingin berhasil dalam memerangi kemiskinan dan menciptakan peluang pengembangan, kami harus memastikan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa ekosistem,

melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, dan memperkuat hak-hak masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat, untuk sumber daya alam. Adanya penilaian ekosistem yang selesai pada 2005, menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara perubahan yang dibuat untuk ekosistem dunia dan manfaat bagi kesejahteraan manusia dan pembangunan nasional.³

Kerjasama pembangunan lingkungan harus memperhitungkan prinsip kebijakan dan pengembangan kebijakan lingkungan Norwegia. Kebijakan pembangunan kita adalah ditetapkan dalam memerangi kemiskinan bersama, dan ini sejalan dengan konsep harmonisasi dan keselarasan dengan strategi dan sistem manajemen negara penerima ditetapkan dalam Deklarasi Paris tentang efektivitas bantuan. Prinsip kunci yang berkembang negara harus memiliki agenda pembangunan mereka, dan bahwa kontribusi kita harus berbasis hak dan menekankan hak-hak perempuan dan pentingnya mereka untuk pembangunan. Perjanjian lingkungan multilateral menetapkan tujuan umum untuk donor dan penerima. Norwegia memiliki kewajiban untuk mendukung negara-negara berkembang dalam mengembangkan kapasitas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

Dasar untuk rencana ini adalah kontribusi Norwegia untuk pengurangan kemiskinan dan pemahaman tentang tantangan yang paling penting yang terkait dengan lingkungan dan sumber daya alam dan dari mana

³http://www.grida.no/documents/ActionPlan_en.pdf, 8-9. *Norwegian Action Plan for Environment in Development Cooperation.*

Norwegia dapat menjadi mitra kerjasama yang bermanfaat. Sebuah berbagai langkah politik, ekonomi dan kompetensi-bangunan di daerah, tingkat nasional, regional dan global akan dipekerjakan, dan langkah-langkah yang mengarah ke perubahan structural dan permanen akan diberikan prioritas. Norwegia bermaksud untuk bekerja secara aktif untuk menempatkan isu lingkungan dalam agenda di hubungan bilateral dan multilateral dengan maksud untuk mengintensifkan upaya umum untuk mengatasi masalah lingkungan yang dihadapi negara-negara berkembang dan untuk melindungi sumber daya alam global untuk generasi mendatang.⁴

Dalam rangka meningkatkan kapasitas negara-negara mitra untuk melihat masalah lingkungan dalam perspektif jangka panjang dan memenuhi kewajiban internasional mereka, Norwegia akan fokus pada kompetensi-bangunan dan pengelolaan lingkungan ditingkatkan. Sumber daya lokal dan regional harus terlibat dalam proyek-proyek dan program untuk sejauh mungkin

Badan-badan PBB adalah mitra kerjasama penting. Norwegia akan terusnya kerjasama pembangunan lingkungan dengan Bank Dunia dan Bank Daerah pembangunan, dan mempromosikan peran normatif sekretariat dari konvensi lingkungan hidup internasional. Norwegia akan aktif mendukung integrasi masalah lingkungan menjadi pekerjaan yang dilakukan oleh badan-badan PBB dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Norwegia akan memberikan preferensi kepada organisasi multilateral yang mengembangkan

⁴*Ibid*, hal 4.

masalah lingkungan. *Global Environment Facility* (GEF) adalah organisasi penting dalam sumber pendanaan untuk upaya untuk menangani masalah lingkungan global.

Organisasi non-pemerintah / lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran penting sebagai pengawas dan penyedia informasi dari penduduk dan pihak berwenang di kedua donor dan negara penerima. Korupsi dan tata kelola dalam menanggulangi masalah lingkungan yang buruk membuatnya penting untuk mengembangkan jaringan yang lebih luas di negara-negara mitra yang penting bagi kerjasama pembangunan hijau di Norwegia. Norwegia otoritas akan terlibat dalam dialog dan kerjasama yang erat dengan LSM di dalam dan luar negeri, dengan tujuan untuk mencapai sinergi dengan pihak-pihak yang terlibat antara lain pemerintah Norwegia, dan organisasi lingkungan internasional. LSM memiliki kompetensi membuat keputusan dalam menangani permasalahan masyarakat. Ini organisasi dapat diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan proyek-proyek tertentu dirancang untuk membangun kompetensi dalam masyarakat sipil di lingkungan dan hak-hak masalah, dan untuk menguji pendekatan baru untuk sumber daya alam dan lingkungan manajemen. Dalam beberapa kasus, upaya LSM dapat melengkapi orang-orang dari sektor publik, sementara dalam kasus lain mereka dapat berfungsi sebagai model untuk pekerjaan di masa depan, khususnya di tingkat lokal. Sebuah sektor swasta lebih dinamis sangat penting untuk pengentasan kemiskinan dan pemangunan ini akan sulit untuk mencapai MDGs tanpa peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan nilai di

negara-negara yang tertinggal dalam ekonomi global. Namun, pembangunan ekonomi berkelanjutan membutuhkan kesadaran dari dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi.⁵

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas dapat ditarik suatu pokok permasalahan yakni “Bagaimana upaya pemerintah Norwegia dalam melaksanakan modernisasi ekologi sebagai strategi politik lingkungan global?”

C. Kerangka Berpikir

Untuk menjelaskan permasalahan yang ada maka akan digunakan teori modernisasi ekologi oleh Athur Mol, Joseph Huber dan Martin Janicke yang diharapkan dapat menjelaskan bagaimana proses upaya pemerintah Norwegia dalam melaksanakan modernisasi ekologi sebagai strategi politik lingkungan global.

Teori Modernisasi Ekologi.

Modernisasi ekologi istilah ini diciptakan oleh sosiolog Jerman Joseph Huber dan ilmuwan politik Jerman Martin Janicke pada awal tahun 1980. Modernisasi ekologi berkaitan dengan adaptasi kembali lingkungan dari pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri. Atas dasar kepentingan pribadi yang tercerahkan, ekonomi dan ekologi dapat menguntungkan

⁵*Ibid*, hal 4.

dikombinasikan: lingkungan produktivitas, yaitu penggunaan produktif sumber daya alam dan media lingkungan (udara, air, tanah, ekosistem), dapat menjadi sumber pertumbuhan di masa depan dan pengembangan di cara yang sama seperti produktivitas tenaga kerja dan produktivitas modal. Ini termasuk peningkatan energi dan efisiensi sumber daya serta produk dan proses inovasi seperti manajemen lingkungan dan manajemen pembangunan yang berkelanjutan, teknologi bersih, zat berbahaya, dan desain produk untuk lingkungan.

Modernisasi ekologi bergerak di luar wacana dan mulai diterapkan sebagai proyek politik pemerintah nasional seperti Inggris, Belanda, Jerman, Jepang, Austria, Denmark, Kanada, dan Amerika Serikat. Belanda, Jerman dan negara-negara Skandinavia yang terkenal karena prestasi mereka dalam melaksanakan modernisasi ekologi sebagai strategi politik seperti terlihat dalam pengurangan polusi, daur ulang, dan efisiensi energi.⁶

Dalam pandangan Huber, modernisasi ekologi menawarkan kita satu-satunya jalan keluar dari krisis ekologi melaluilebih industrialisasi, meskipun dengan perubahan produksi dan konsumsi. Namun, pandangan ini dalam aspek industri dan teknologi dan mengabaikan konteks sosial dalam yang ini terjadi peralihan ekologis dipandang sebagai tahap logis perlu dan tak perlu

⁶Hapsari,K, Maharani. *Globalization and Environmental Reform in Developing Countries: Potentials and Limits of Ecological Modernization*. Journal of international studies Multiversa.Gadja Mada Univesity 02 (2011) : 08-13.

dan tak terelakkan dalam pengembangan sistem industri. Perkembangan teknologi terjadi sebagian besar mandiri dan bertindak untuk menentukan perubahan dalam sistem industri dan hubungan mereka dengan social dan lingkungan alam.⁷

Mengenai peran pemerintah dalam proses modernisasi ekologi, Huber percaya bahwa jumlah campur tangan pemerintah dalam mengenai lingkungan terbatas. Konsistensi pemerintah dengan teori ekonomi pasar bebas pada saat itu, Huber merasa bahwa keterlibatan pemerintah adalah mungkin untuk mengacaukan proses inovasi seperti adalah untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat. Dia juga berpendapat bahwa baru gerakan social, seperti gerakan lingkungan, memiliki peran yang terbatas untuk bermain dalam mewujudkan pergeseran untuk bentuk yang lebih ramah lingkungan dari industri masyarakat. Pelaku ekonomi dan pengusaha yang memahami lingkungan sebagai yang paling penting dalam mencapai transformasi terkait dengan modernisasi ekologi.

Menurut Janicke modernisasi ekologi adalah restrukturisasi ekonomi nasional yang melibatkan kedua teknologi dan sektoral komposisi mereka. modernisasi ekologi berusaha perubahan struktural di tingkat makro ekonomi. Kelihatannya untuk industri sektor yang menggabungkan tingkat yang lebih tinggi dari ekonomi pengembangan dengan tingkat yang lebih rendah dari fakta lingkungan. Secara khusus, ia berusaha untuk menggeser

⁷Huber, Joseph. *"Pioneer Countries and the Global Diffusion of Environmental Innovations"*. Cambridge : MIT Press, 2008.

penekanan dari makro ekonomi dari energi dan sumber daya industri padat terhadap layanan dan pengetahuan industri padat.⁸

Dalam memvisualisasikan arah reformasi lingkungan teori modernisasi ekologi berpendapat bahwa krisis ekologi dapat diatasi bukan dengan radikal mengubah modus kapitalis konsumsi produksi. Mereka menetap pada transformasi sosial, politik, dan ekonomi secara bertahap yang bekerja dengan dukungan inovasi teknologi lingkungan sebagai jalur yang diinginkan.

Menurut Athur Mol modernisasi ekologi adalah gerakan kepentingan ekologi, gagasan dan pertimbangan dalam praktik social dan perkembangan kelembagaan. Hal ini mengakibatkan terinspirasi ekologi dan proses lingkungan induksi transformasi dan reformasi yang terjadi di inti praktek dan lembaga pusat masyarakat modern⁹.

Dalam ungkapan Blowers, modernisasi ekologi memandang tahapan sejarah masa kini yaitu krisis ekologi ssebagai satu momen transisi menuju modernisasi yang lebih berkesinambungan. Asumsi pokok sebagian besar para teoretisi ME menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat disesuaikan dengan realita kelangsungan ekologis. Dalam penyesuaian ini

⁸Janicke, M. (1990) *State Filure: The Importence of Plitics in Industrial Society*. Cambridge: Polity Press.

⁹<http://ic.ucsc.edu/~rlipsch/EE80S/Buttel.pdf>. "Ecological modernization as social theory"

dapat ditempuh melalui penerapan tiga strategi utama: ekologis produksi (pengurangan limbah sampah); perbaikan pasar dan kerangka kerja regulasi agar dapat mencerminkan prioritas-prioritas ekologis yang lebih baik; dan penghijauan nilai-nilai dan praktek sosial dan perusahaan.¹⁰

D. Hipotesa

Berdasarkan uraian dari kerangka berpikir, dapat ditarik hipotesis:

- A. Pemerintah Norwegia melalui industri hijau dalam modernisasi lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat dan menyadarkan masyarakatnya untuk mencintai lingkungan.
- B. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan Norwegia sebagai upaya modernisasi ekologi untuk kesejahteraan masyarakat dunia.
- C. Kerjasama internasional Norwegia dengan negara-negara dunia dan lembaga dunia dalam mempengaruhi isu lingkungan global.

E. Metode Pengumpulan Data

Penulisan ini menggunakan teknik studi pustaka. Sumber data bersifat literatur, yang diperoleh melalui perpustakaan yaitu seperti buku-buku, jurnal, majalah, dan artikel serta menggunakan sumber-sumber artikel dan internet yang mempunyai relevansi dengan penulisan ini.

¹⁰ Andrew Blowers 'Kebijakan Lingkungan: Modernisasi Ekologi ataukah Masyarakat Resiko. dipetik 15 Agustus 2015

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis memberikan batasan-batasan. Penelitian dilakukan tahun 1990-an yang dimana Norwegia adalah negara pertama di dunia yang memiliki pelayanan di tingkat kabinet dengan bertanggungjawab khusus untuk masalah lingkungan. Tata kelola lingkungan nasional di Norwegia diatur secara hirarkis. Di bagian atas adalah Kementerian Lingkungan Hidup yang merupakan lembaga pemerintah terkemuka mengenai isu-isu lingkungan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan utuh.

BAB I

Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Teoritik, Hipotesa, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II

Bab ini akan menguraikan tentang negara Norwegia secara umum.

BAB III

Bab ini akan menguraikan proses modernisasi ekologi negara Norwegia pada tahun 1980-an sampai tahun 2000-an sebagai peran dalam masyarakat norwegia dan masyarakat global.

BAB IV

Bab ini akan menguraikan proses upaya dan peranan pemerintah Norwegia dalam modernisasi ekologi kepada dunia internasional untuk mewujudkan negara hijau.

BAB V

Kesimpulan, berisi penyimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya.